

DAFTAR ISI

PRAKATA	ix
PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	22
C. KEASLIAN PENELITIAN	24
D. METODE PENELITIAN	32
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIANNYA	39
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI SUBSISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	40
B. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53
1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	53
2. Sejarah Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Dunia	60
3. Sejarah Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	70
C. PERDA SEBAGAI SUBSISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	103
1. Pengertian Perda	103
2. Kedudukan Perda	109
3. Materi Muatan Perda	116

BAB III BASIS TEORETIS GAGASAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA	125
A. KONSTITUSIONALISME	126
B. TEORI SUPREMASI KONSTITUSI	138
1. Konsep Dasar Supremasi Konstitusi	138
2. Penegakan Supremasi Konstitusi	142
3. Supremasi Konstitusi di Indonesia	152
C. HIERARKI NORMA	159
1. Hierarki dan Validitas Norma	159
2. Konsekuensi Penganutan Hierarki Norma	165
3. Hierarki Norma dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia	168
D. MODEL-MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	177
1. Pemodelan Pengujian Peraturan Perundang-undangan	179
2. Model yang Berlaku di Indonesia	194
3. Pengujian Konstitusionalitas dan Legalitas	196
4. Kompetensi Kelembagaan Penguji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan	222
5. Perluasan Kompetensi Kelembagaan Peradilan Konstitusi dengan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i>	226
BAB IV KEKOSONGAN MEKANISME PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA	231
A. SISTEM PENGUJIAN PERDA	231
B. MASALAH KONSTITUSIONALITAS PERDA	243
1. Perda Diskriminatif	246
2. Motivasi Pembentukan Perda Diskriminatif	258
3. Dampak Perda Diskriminatif	260
C. ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PERDA	264
D. PRAKTIK PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG	319
1. Kondusivitas Ketentuan Normatif dalam Mewujudkan Keadilan	327
2. Akuntabilitas Praktik Peradilan	330
3. Tingkat Kepatuhan pada Asas-asas Peradilan	335
4. Ketersediaan Ruang bagi Kontestasi Gagasan	343
BAB V PEMODELAN BARU MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	349
A. PENGUATAN MEKANISME PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA	351
1. Model 1: Penyatupatan Terbatas Pengujian Konstitusionalitas Perda di Mahkamah Konstitusi	356
2. Model 2: Perluasan Kewenangan MA dalam Pengujian Konstitusionalitas Perda	365
3. Model 3: Penyatupatan Holistik Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi	375
B. PELEMBAGAAN <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENYIKAPAN INKONSTITUSIONALITAS PERDA	416
C. PERSPEKTIF PROGRESIF PENYIKAPAN INKONSTITUSIONALITAS PERDA	421
BAB VI PENUTUP	425
A. KESIMPULAN	425
1. Mekanisme Pengujian Perda	425
2. Kekosongan Mekanisme Pengujian Konstitusionalitas Perda	427
3. Penguatan Mekanisme Pengujian Perda dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	430
B. SARAN	438
DAFTAR PUSTAKA	441
INDEKS	475
TENTANG PENULIS	485